

## BAB II

### SEJARAH MNC DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Dalam bab ini akan membahas tentang Multinasional corporations (MNCs) dan sejarahnya, masuknya MNCs di Indonesia dan PT. Newmont sebagai MNCs yang mengelola tambang di Nusa Tenggara Barat.

#### A. MNC dan Sejarahnya

Dalam hubungan internasional kontemporer, peran MNCs tidak dapat lagi dipandang sebelah mata. MNCs kini menjadi aktor penting, sejajar dengan negara, IGO, INGO dan lainnya. Hal tersebut terkait dengan kekuatan ekonomi dan keberhasilan ekspansinya di negara-negara di seluruh belahan dunia. Keberhasilan tersebut mengantarkan MNCs memperoleh kekuasaan tidak hanya di bidang perdagangan dan ekonomi, namun juga merambah di bidang politik. MNCs adalah korporasi yang memiliki fasilitas dan aset-aset paling tidak di satu negara lain daripada negara asal atau *home country*-nya. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kantor atau pabrik di negara-negara lain dan biasanya memiliki kantor pusat tempat mereka mengkoordinasikan manajemen global.<sup>16</sup>

Terutama pada masa globalisasi ini, korporasi multinasional beroperasi di mana-mana. Mereka menyeberangi tepi batas disiplin ilmu semudah mereka menyeberangi tapal batas nasional. Mereka mencakup penjelajahan dalam bidang ilmu politik, ilmu sosial, dan psikologi selain ilmu ekonomi. Dapat dikatakan bahwa

---

<sup>16</sup> *Multinational Corporation-MNC* (diakses pada tanggal 27 Juni 2012); diunduh <http://www.investopedia.com/terms/m/multinationalcorporation.asp>

timbulnya para manajer dunia yang memimpin MNCs raksasa menimbulkan zaman keemasan atau dominasi kerajaan dalam bentuk baru. Orang-orang yang mengelola korporasi sejagad (*global corporations*) adalah orang pertama dalam sejarah memiliki organisasi, teknologi, uang dan ideologi untuk mencoba mengelola dunia sebagai satu kesatuan terpadu. Orang yang bermimpi menguasai jagad pada masa sebelumnya hanyalah penipu diri atau ahli mistik. Artinya adalah bahwa impian menguasai dunia dengan menggunakan kekuatan militer oleh sederetan raja dan penguasa, kini sudah tidak relevan lagi. Kekuasaan Hitler, Sistem Napoleonistik, Kemaharajaan Inggris dan Pax Americana tidak satu pun berhasil menciptakan sesuatu yang menyerupai organisasi sejagad untuk mengatur planet ini, yang dapat bertahan selama satu generasi sekalipun. Dan korporasi multinasional yang mampu mewujudkan menguasai dunia pada masa globalisasi ini.

Korporasi multinasional sudah ada sejak abad ke-17 pada saat didirikannya VOC yang diklaim sebagai MNC pertama di dunia. VOC didukung oleh pemerintah Belanda, serta diberi wewenang untuk merekrut pasukan, membuat kapal-kapal, memulai perang, mencaplok suatu daerah, mendirikan dan menduduki benteng-benteng, memungut pajak, negosiasi dengan para kepala suku atas nama pemerintah.<sup>17</sup> VOC kemudian memulai ekspansinya ke negara-negara lain. VOC mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1619, dengan rute perdagangan VOC meliputi sepanjang Asia seperti China, Jepang, India, dan Persia.

Monopoli perdagangan dan penguasaan atas jajahannya menjadikan VOC perusahaan privat terkaya di dunia pada 1669. Kompeni memiliki 150 kapal dagang,

---

<sup>17</sup> RGS & Mitra, "VOC, Korporasi Multinasional Yang Digagas Pengacara" (diakses pada 22 Juni 2012); diunduh dari: <http://rgs-artikel-hukum.blogspot.com/2012/05/voc-korporasi-multinasional->

40 kapal perang, 20,000, pelaut, 10,000 tentara, 50 ribu pekerja, dan pembayaran dividen 40 % dari keuntungan perusahaan.<sup>18</sup>

Setelah itu, selain VOC di Belanda, fenomena MNC juga muncul dari negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris. Inggris menerapkan perubahan dalam perdagangan dari *national source* menjadi *foreign operation*. Inggris yang mengawali *capital exports*, berawal dari peran pertamanya dalam revolusi industri, kekaisaran besarnya dan angkatan laut dominan, serta perannya sebagai markas atau tempat pasar uang internasional, secara natural mengakibatkan Inggris sebagai pemilik *foreign productive assets* terbesar bersama Perancis dan Jerman. Ketiganya terhitung memiliki hampir 90% *foreign investment* di awal pecahnya Perang Dunia I, Inggris memiliki 50%, sementara sisanya, Perancis dan Jerman, memiliki 40%.<sup>19</sup>

Bagi Amerika, berdagang di luar negeri juga bukan merupakan hal baru. Pada akhir abad yang lalu, perusahaan-perusahaan Amerika seperti Singer Sewing Machine Company sudah memainkan peranan penting dalam perekonomian Inggris, Ford telah memiliki pabrik perakitan di Eropa sejak tahun 1911, dan berbagai perusahaan minyak besar telah beroperasi dalam skala hampir sejagad sejak permulaan abad ini.<sup>20</sup>

Motifasi utama dari ekspansi MNC tersebut adalah efisiensi. Seperti yang dikatakan George Ball, mantan wakil menteri luar negeri AS dan ketua Lehman Brother Internasional, "Manusia untuk pertama kalinya berhasil menggunakan

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Devania Annesya, "Korporasi Multinasional (MNCs) dan Pembangunan: Sebuah Kontradiksi" (Diakses pada: 10 Juni 2012), diunduh dari: <http://frenndw.wordpress.com/2012/06/26/korporasi-multinasional-mnc-dan-pembangunan-sebuah-kontradiksi>

<sup>20</sup> Richard J. Barnet & Ronald E. Muller, *Menjangkau Dunia: Menguk Kekuasaan Perusahaan Multinasional* (Jakarta: LP3ES, 1984), hal 8

sumber-sumber dunia dengan efisien seperti yang didiktakan oleh logika keuntungan yang obyektif.”<sup>21</sup> Selain efisiensi, esensi lain dari MNC adalah sentralisasi kebijakan dan pemanduan operasi-operasi pokok diantara cabang-cabangnya. Mereka menerapkan prinsip biaya komparatif serta pembagian kerja dan menerapkannya dalam skala sejagad untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian setiap bagian dari korporasi multinasional mengerjakan apa yang terbaik dan termurah untuk dilakukan. Masing-masing menyumbang bagian itu kepada keseluruhan perusahaan yang menurut pimpinan tingkat tinggi adalah paling rasional. Seperti misalnya lebih rasional bagi General Electric untuk merakit komponennya di Singapura dengan biaya 30 sen sejam, daripada memproduksinya di Amerika dengan biaya \$ 3,40 sejam.

Menurut Jacques Maisonrouge, korporasi multinasional adalah:

Sebuah korporasi adalah struktur bisnis yang tujuan hidup satu-satunya adalah mencari keuntungan dengan menghasilkan produk-produk dengan biaya serendah mungkin dan menjualnya dengan harga setinggi mungkin. Tidak jadi soal apakah produk itu benar-benar berguna atau merugikan: yang penting ia dikonsumsi dalam jumlah yang semakin besar. Oleh karena segala sesuatu yang dikerjakan korporasi benar-benar bertujuan akhir penciptaan keuntungan, maka ia tidak memberikan rasa kepuasan pribadi kepada para pekerjanya, tak menimbulkan perasaan menyumbangkan sesuatu yang berfaedah bagi masyarakat, tak menumbuhkan makna yang berarti dari kegiatan mereka. Bekerjalah untuk sebuah korporasi: maka anda, dengan gaji yang tinggi dan berbagai tunjangan tambahan, akan dijadikan satu mata rantai yang tak berbentuk dalam rantai yang panjang – sambil mengakhiri ingkaran itu dengan menjadi konsumen tambahan bagi semua barang rongsokan itu. Dan seperti halnya semua lingkaran, seluruh sektor tidak bermakna apa-apa.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> George Ball dikutip dalam “Menjangkau Dunia: Menguak Kekuasaan Perusahaan Multinasional” Richard J. Barnet & Ronald E. Muller (Jakarta: LP3ES, 1984), hal 3

<sup>22</sup> Maisonrouge, dikutip dalam “Menjangkau Dunia: Menguak Kekuasaan Perusahaan Multinasional, Richard J. Barnet & Ronald E. Muller (Jakarta: LP3ES, 1984) hal 16

Dari kutipan *Maisonrouge* tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan, termasuk juga perusahaan multinasional hanya bermotifasi untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, dengan mengeluarkan biaya produksi seminimal mungkin. Mereka juga tidak peduli terhadap keadaan lainnya, termasuk lingkungan sosial tempat mereka beroperasi, dan juga keadaan para buruh perusahaan mereka. Bahkan mereka tidak peduli apakah produk yang mereka hasilkan itu bermanfaat dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Hal yang mereka pentingkan adalah bagaimana produk apapun yang mereka produksi dapat diterima oleh masyarakat dan memberi keuntungan sebanyak-banyaknya bagi perusahaan mereka.

Pertumbuhan MNC berlangsung sangat pesat. Jumlah keuntungan yang diperoleh beberapa MNC lebih besar dibandingkan dengan *Gross National Product* (GNP) suatu negara. Seperti halnya saat ini aset General Motor (AS) dan Exxon (AS) lebih besar ketimbang Yugoslavia, Swiss maupun Arab Saudi. British Petroleum (Inggris) menghasilkan lebih dibanding apa yang didapat Bulgaria, atau Finlandia. Penjualan General Motor dapat melebihi GNP negara-negara di dunia. Pada tahun 1997 total penjualan General Motors mencapai US\$ 164 milyar, sementara GDP Norwegia hanya sebesar US\$ 153 milyar, GDP Indonesia US\$ 52,2 milyar.<sup>49</sup>

Sejak tahun 1970-an, korporasi di Amerika mendapatkan keuntungan lebih besar di luar negeri dari pada di dalam negeri. Akibatnya, berbagai korporasi Amerika banyak yang memindahkan aset-aset mereka ke luar negeri, terutama di negara dunia ketiga untuk mencapai prinsip efisiensi produksi yang rasional untuk

Korporasi multinasional lebih suka berinvestasi ke negara-negara berkembang dengan tingkat kesenjangan sosial yang luas seperti Indonesia, India atau China karena memang cukup menguntungkan. Sebagai balas jasanya, korporasi multinasional tersebut menawarkan bantuan dalam bentuk Corporate social responsibility (CSR) walaupun jumlahnya memang jauh sangat sedikit bila dibandingkan aset perusahaan tersebut dan keuntungannya yang diperoleh dari operasinya di negara-negara tersebut. Keadaan masyarakat di negara host tempat korporasi-korporasi besar beroperasi masih sangat memprihatinkan. Pada tahun 2010, dari 925 seluruh jumlah manusia di muka yang mengalami kekurangan pangan dan gizi, sebagian besar penderita kelaparan dan kekurangan gizi tersebut adalah orang-orang yang tinggal di negara berkembang seperti Indonesia, Brazil, India dan banyak negara Afrika. (Jacques Diouf, Dirjen FAO).<sup>23</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan MNCs dan program CSR yang mereka laksanakan belum dapat membantu perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di negara asalnya.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan keuntungan yang mereka peroleh. Korporasi multinasional (MNCs) ini merampok kekayaan SDA di wilayah negara-negara berkembang. Adanya eksploitasi SDA yang rakus, membawa dampak pada pemiskinan dan penderitaan global rakyat kecil. Dari hasil eksploitasi MNCs, mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan finansial. Dalam laporan pendapatannya untuk tahun 2007, pihak ExxonMobil memperoleh keuntungan sebesar \$40.6 Billion atau setara dengan Rp3.723.020.000.000.000 (dengan kurs rupiah 9.170). Nilai

<sup>23</sup> Ajie Adnan, "Kenyataan Pahit Dibalik Masalah Keamanan Pangan Global", (Diakses pada: 22 Juni 2012) diunduh dari <http://sosbud.kompasiana.com/kenyataan-pahit-dihalik-masalah-keamanan->

penjualan ExxonMobil mencapai \$404 billion, melebihi Gross Domestic Product (GDP) dari 120 negara di dunia. Setiap detiknya, ExxonMobil berpendapatan Rp 11.801.790, sedangkan perusahaan minyak AS lainnya, Chevron, melaporkan keuntungan yang diperolehnya selama tahun 2007 mencapai \$18, 7 billion atau Rp171.479.000.000.000. Royal Ducth Shell menyebutkan nilai profit yang mereka dapatkan selama setahun mencapai \$31 milyar atau setara dengan Rp 284.270.000.000.000.<sup>24</sup>

Keuntungan yang diperoleh korporasi-korporasi negara imperialis ini tidaklah setara dengan Produk Domestic Bruto (PDB) beberapa Negara dunia ketiga, tempat korporasi tersebut beroperasi. Hingga akhir tahun 2007, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia belum sanggup menembus 4.000 Trilyun rupiah, untuk triwulan ke III tahun 2007 saja hanya mencapai 2.901. trilyun rupiah. Untuk Negara penghasil minyak lainnya, Libya hanya 50.320 juta US\$, Angola (44, 033 juta US\$), Qatar (42, 463US\$), Bolivia (11.163 juta US\$), dan lain-lain.<sup>25</sup>

Dengan demikian, keberadaan MNCs di negara dunia ketiga merupakan tindakan eksploitasi yang luar biasa terhadap negara hostnya. Dari kegiatan tersebut, MNCs mendapatkan keuntungan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari GNP suatu negara. Selain itu, kekuatan ekonomi mereka telah mengantarkan MNCs juga memiliki kuasa pada wilayah politik yang merupakan suatu jalan untuk memuluskan ekspansinya dan mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi.

---

<sup>24</sup> Taufik Hidayat, *Bukti Kejahatan Korporasi Asing Berkedok HAM* (diakses pada 22 Juni 2012) diunduh dari: <http://www.jurnal-ekonomi.org/bukti-kejahatan-korporasi-asing-berkedok-ham/>

## B. Sejarah dan Perkembangan MNC di Indonesia

Perkembangan MNCs secara masiv di Indonesia baru terjadi pada masa orde baru pada saat presiden Soeharto berkuasa. Sebelumnya, pada masa Orde lama, Presiden Soekarno membatasi peran pihak asing, termasuk investasi dan MNCs di Indonesia. Presiden Soekarno percaya pada kemandirian ekonomi bangsa Indonesia. Dia menentang masuknya korporasi barat ke Indonesia dan mengusir agen-agen barat seperti World Bank dan IMF. Namun demikian, Soeharto yang pada saat itu menjadi jenderal, berhasil mengambil alih kekuasaan Soekarno. Pada tahun 1960-an, dengan isu komunisme, Soeharto melakukan pembantaian terhadap jutaan orang Indonesia yang dituduh sebagai komunis, dan kemudian naik tahta sebagai presiden mengambil alih kedudukan presiden Soekarno.<sup>26</sup>

Setelah itu, diketahui bahwa ternyata Soeharto mendapat dukungan dari Amerika, Inggris dan para pengusaha Barat. Pada masa kekuasaannya, perekonomian Indonesia dibentuk menurut model Amerika Serikat yang liberal dan terbuka terhadap investasi dan perdagangan internasional untuk mempermudah Barat menguasai sumber mineral, pasar dan buruh murah.

Pada tahun 1967, beberapa saat setelah Presiden Soeharto berkuasa, perusahaan Timelife mengadakan Konferensi di Swiss yang merencanakan pengambil alihan bisnis di Indonesia. Konferensi ini dihadiri para pebisnis besar dan terkuat di dunia, misalnya David Rockefeller, raksasa kapitalis barat diwakili oleh Perusahaan minyak, bank, General Motor, British Lyeland, ICI, British American Tobacco, Lehman Brothers, American Express, Siemens. Dan dari Indonesia,

<sup>26</sup> 65 John Pilger, *The New Rules of The World* (London: Oasis Filevision 2002) 1 videocassette (54



diwakili oleh negosiator yang dikirim oleh Presiden Soeharto. Konferensi tersebut berlangsung selama tiga hari. Hari pertama, wakil dari Indonesia tampil memberikan uaiannya, di hari kedua, mereka membagi pembicaraan menjadi lima bagian, yaitu pertemuan sektoral, pertambangan, jasa makanan, industri ringan, serta perbankan dan keuangan. Selanjutnya mereka menyusun kebijakan yang menguntungkan investor sedunia, agar para investor tersebut dapat masuk kesemua sektor, kemudian mereka menyusun infrastruktur hukum untuk kepentingan investasi mereka di Indonesia.<sup>27</sup>

Setelah itulah Indonesia menjadi sangat terbuka terhadap perdagangan dan investasi asing, termasuk ekspansi korporasi multinasional. Saat ini fakta menunjukkan bahwa sumber-sumber kekayaan alam negeri ini sepenuhnya dikelola dan dikendalikan oleh perusahaan MNC. Di Indonesia, di bawah Bung Karno, pemerintahan Soekarno mengeluarkan kebijakan UU No. 86/1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, termasuk sektor pertambangan. Selain itu, Bung Karno memberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1960 yang mempertegas pengelolaan minyak dalam kontrol Negara. Setelah itu, Bung Karno menyerahkan skema profit-sharing agreement (PSA) yakni 60:40, ditambah kebijakan lain seperti MNC wajib menyerahkan 25 persen area eksplorasi setelah 5 tahun dan 25 persen lainnya setelah 10 tahun. Selain itu, MNC wajib menyediakan kebutuhan untuk pasar domestik dengan harga tetap dan menjual aset distribusi pemasaran setelah jangka waktu tertentu. Skema Bung Karno langsung disetujui oleh presiden AS saat itu, John F. Kennedy, dan tiga raksasa minyak dunia (Stanvac, Caltex, dan Shell). Cerita sukses

Bung Karno itu bisa dilihat dalam prestasi sektor pendidikan, yakni tingkat melek huruf naik dari 10 ke 50 persen (1960). Biaya pendidikan pada masa itu juga sangat murah.<sup>28</sup>

Hal tersebut sangat berbeda dengan keadaan Indonesia pada masa sekarang dengan dominasi yang kuat dari korporasi multinasional. Dapat kita bandingkan, jika Presiden Soekarno menentang kehadiran korporatokrasi, Presiden Soeharto justru sebaliknya. Tak heran utang luar negeri Soekarno tak lebih dari 2,5 milyar dolar AS, sebaliknya utang luar negeri Soeharto lebih dari 100 milyar dolar AS dan utang luar negeri pemerintahan SBY saat ini sebesar Rp 1.878 triliun (posisi pada April 2010).<sup>29</sup>

Sejak ekspansinya secara besar-besaran pada tahun 1970-an, selain mendapat dukungan dari rezim yang berkuasa, MNC juga mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat Indonesia sendiri. Selain eksploitasi terhadap sumber daya alam untuk bahan baku produksi, MNC juga memanfaatkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan buruh yang murah dan pasar yang strategis.

MNCs telah mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara habis-habisan untuk bahan baku produksi mereka. Kandungan kekayaan alam yang dimiliki oleh tanah air kita justru memberikan kemakmuran melimpah kepada korporasi-korporasi asing, dan sangat sedikit sekali yang dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri.

---

<sup>28</sup> *Nasional-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND)* (diakses pada 23 Desember 2010); diunduh dari <http://groups.yahoo.com/group/unklabstudentmail/message/24348>

<sup>29</sup> Restian, "Membongkar kejahatan Jaringan Internasional", (diakses pada 23 Desember 2010), diunduh dari <http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2045522-membongkar-kejahatan->

Dalam laporan pendapatannya untuk tahun 2007, pihak ExxonMobil memperoleh keuntungan sebesar \$40.6 Billion atau setara dengan Rp3.723.020.000.000.000 (dengan kurs rupiah 9.170). Nilai penjualan ExxonMobil mencapai \$404 billion, melebihi Gross Domestic Product (GDP) dari 120 negara di dunia. Setiap detik, ExxonMobil berpendapatan Rp 11.801.790, sedangkan perusahaan minyak AS lainnya, Chevron, melaporkan keuntungan yang diperolehnya selama tahun 2007 mencapai \$18, 7 billion atau Rp171.479.000.000.000. Royal Ducth Shell menyebutkan nilai profit yang mereka dapatkan selama setahun mencapai \$31 milyar atau setara dengan Rp 284.270.000.000.000.<sup>30</sup>

Di Indonesia, menurut laporan Energy information Administration (EIA) dalam laporannya (jan/08) mengatakan bahwa total produksi minyak Indonesia rata-rata 1, 1 juta barel per-hari, dengan 81% (atau 894.000 barel) adalah minyak mentah (crude oil). Untuk produksi gas alam, Indonesia sanggup memproduksi 97.8 juta kubik. Indonesia masuk dalam daftar ke 9 penghasil gas alam di dunia, dan merupakan urutan pertama di kawasan Asia Pasifik.

Sayangnya, hampir 90% dari total produksi tersebut berasal dari 6 MNC, yakni Total (diperkirakan market share-nya di tahun 2004, 30%), ExxonMobil (17%), Vico (BP-Eni joint venture, 11%), ConocoPhillips (11%), BP (6%), and Chevron (4%). Sedang, stok gas bumi mencapai 187 triliun kaki kubik atau akan habis dalam waktu 68 tahun dengan tingkat produksi dan masih banyak contoh eksploitasi SDA Indonesia oleh MNC lainnya. per tahun sebesar 2, 77 triliun kaki kubik. Cadangan batu bara ada sekitar 18, 7 miliar ton lagi atau dengan tingkat produksi 170 juta ton

<sup>30</sup> Taufik Hidayat, "Bukti Kejahatan Korporasi Asing Berkedok HAM" (diakses pada 22 Desember 2010) diunduh dari: <http://www.jurnal.ekonomi.org/2009/12/22/bukti-kejahatan-korporasi-asing>

per tahun berarti cukup buat memenuhi kebutuhan selama 110 tahun.<sup>31</sup> Namun demikian, sumber-sumber selain minyak tersebut juga didominasi oleh korporasi asing. Seperti halnya dengan sumber emas di Indonesia, juga dieksploitasi oleh korporasi asing. Selama ini, PT.NNT melakukan eksplorasi emas di wilayah Batuhijau, Sumbawa, NTB. Pada tahun 2010 ini, PT.NNT berhasil mendulang sekitar 744.000-810.000 ounce emas.<sup>32</sup>

Dengan kekayaan alam yang melimpah, dan dominasi sumber-sumber tersebut oleh MNCs, nasib rakyat Indonesia masih sangat memprihatinkan. Jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 40% dari total angkatan kerja.<sup>33</sup> Selain itu, Bank Dunia menyebutkan sekitar 49, 5% Rakyat Indonesia berpendapatan di bawah 2US\$/hari. Di sektor pendidikan, yang menjadi pilar utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), justru menggambarkan situasi yang lebih miris. Menurut data Susenas 2004, dari penduduk usia sekolah 7–24 tahun yang berjumlah 76 juta orang, yang tertampung pada jenjang SD sampai dengan PT tercatat baru mencapai 41, 5 juta orang atau sebesar 55 persen.<sup>34</sup>

Nasib buruh yang bekerja di MNCs cukup memprihatinkan. Korporasi bekerjasama dengan negara membuat peraturan yang merugikan bagi para buruh.

---

<sup>31</sup> Kementerian ESDM dikutip dalam “*Nasional- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND)*” (diakses pada 23 Desember 2010), diunduh dari: <http://groups.yahoo.com/group/unklabstudentmail/message/24348><http://groups.yahoo.com/group/unklabstudentmail/message/24348>

<sup>32</sup> Kontan E-Paper, *Ternyata Potensi Emas Indonesia Masih Banyak* (diakses 23 Desember 2010), diunduh dari: <http://industri.kontan.co.id/v2/read/Industri/55000/Ternyata-potensi-emas-Indonesia-masih-banyak>

<sup>33</sup> Christopher Lingle, “Restoring Indonesia's economy to a higher growth path”., Jakarta Post 20/02/08

<sup>34</sup> *Nasional- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND)*” (diakses pada 23 Desember 2010), diunduh dari: <http://groups.yahoo.com/group/unklabstudentmail/message/24348><http://groups.yahoo.com/group/unklabstudentmail/message/24348>

Itulah sebabnya buruh di Indonesia semakin menderita. Negara mengubah peraturan perburuhan sedemikian rupa sehingga menguntungkan pengusaha (global) dengan merugikan para buruh. Negara dan bisnis menciptakan sistem perburuhan baru yang diberi nama Labour Flexibility Market (LFM). Hal yang terjadi sebelumnya dianggap sistem yang menyusahkan pihak korporasi, karena perusahaan harus mengangkat tenaga tetap, harus menyediakan berbagai fasilitas, dan tentu saja menyediakan pensiun. Sistem LFM yang ditetapkan pemerintah atas dorongan korporasi multinasional, pada dasarnya meliputi.<sup>35</sup>

1. *External numerical flexibility* : yaitu jumlah pekerja disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha.
2. *Externalisation*: yaitu, sebagian dari pekerjaan perusahaan diserahkan kepada sub-kontrak.
3. *Internal numerical flexibility*: yaitu, jam kerja dan kerja itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha.
4. *Fuctional flexibility*: yaitu, jenis pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha.
5. *Wages flexibility*: yaitu, upah kerja disesuaikan dengan produktivitas dan situasi pasar.

Peraturan tentang perburuhan di Indonesia tersebut jelas sangat menguntungkan pihak korporasi dan merupakan suatu bentuk eksploitasi terhadap para buruh. Dimana buruh-buruh bekerja dengan sistem kontrak, tanpa menjadi tenaga kerja tetap, mereka dapat diberhentikan kapan saja jika kontraknya telah habis. Dengan kata lain, nasib

<sup>35</sup> Munck, 2002:72 dikutip dalam "Perusahaan MNC" (diakses pada 23 Desember 2010); diunduh dari <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/perusahaan-mnc/>

mereka terombang-ambing oleh perusahaan. Selain itu, penetapan jam kerja dan jenis pekerjaan yang disesuaikan oleh pihak perusahaan seringkali menjadi lahan eksploitasi terhadap para buruh Indonesia. Sebagai contoh, para buruh pabrik yang memproduksi GAP, pada saat permintaan ekspor meningkat, lebih dari 1000 buruh dipaksa kerja lembur 24 jam per hari. Terkadang mereka bekerja dari jam 8 sampai jam 12 malam, para buruh tersebut bekerja di ruang dengan lampu yang bersuhu 40°C dengan berdiri selama ber jam-jam. Di sisi lain hal yang sangat mengejutkan adalah, produk yang mereka buat, salah satunya pakaian olah raga bermerk GAP, dibandrol harga 112 ribu, dan dari jumlah tersebut, buruh pabrik hanya mendapat bagian 500 rupiah saja. Untuk sepatu Nike seharga 1,4 juta rupiah, buruh yang memproduksi sepatu tersebut hanya memperoleh 5 ribu rupiah saja. Dan contoh yang lebih mengejutkan adalah, untuk mempromosikan sepatu Nike, pegolf Tiger Wood mendapatkan honor yang lebih besar daripada gaji seluruh buruh di perusahaan yang memproduksi sepatu tersebut di Indonesia.<sup>36</sup>

Indonesia juga merupakan pasar yang sangat potensial bagi MNCs. Jumlah penduduknya yang mencapai 237,556,363 penduduk merupakan pasar yang sangat strategis bagi pelembaran produk-produk MNC. Dengan antusiasme yang tinggi, masyarakat di suatu negara dengan senang hati menjadi konsumen setia dari produk-produk perusahaan multinasional, padahal MNC mengambil keuntungan yang lebih besar daripada produk lokal, serta keuntungan tersebut akan dibawa kembali ke negara asalnya. Dengan situasi seperti ini, tidak dielakkan lagi keuntungan yang

<sup>36</sup> John Pilger, *The New Rules of The World* (London: Oasis Television, 2002) 1 videocassette (54 min)

diperoleh MNC pun sangatlah besar. Sebagai contoh, keuntungan total dari perusahaan GAP mencapai 38 milyar dolar pada tahun 2001.<sup>37</sup>

## **C. Gambaran Umum tentang PT Newmont Nusa Tenggara Barat**

### **1. Profil PT Newmont Nusa Tenggara Barat**

Newmont Mining Corporation (NMC) merupakan perusahaan penghasil emas terkemuka yang beroperasi di lima benua. Didirikan pada tahun 1921 di kota New York. Newmont juga terdaftar di Bursa Saham Australia dan Toronto, dengan domisili hukum di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Dengan berkantor pusat di Denver, Colorado Amerika Serikat. Newmont Mining Corporation melakukan operasi penambangan di seluruh dunia dengan lokasi kantor eksplorasi di Amerika Utara (Nevada, California), Amerika Selatan (Mexico, Peru) dan Asia (Indonesia, Uzbekistan). Newmont Gold corporation terdaftar di pasar modal : New York Stock Exchange (Amerika Serikat), Paris Bourse (Perancis-Eropa), Swiss Stock Exchange (Switzerland-Eropa), Brussels Stock Exchange (Peru-Amerika Selatan). Prestasi perusahaan tahun 1999 adalah satu-satunya perusahaan penghasil mineral ekonomis di Amerika Utara yang mencatat harga saham yang tinggi ditahun tersebut dan melanjutkan keberhasilan eksplorasi untuk mempertahankan jumlah cadangan total sebesar 56,6 juta ons emas di tahun yang sama. Di Indonesia NMC mendirikan dua anak perusahaan yaitu Newmont Minahasa Raya (MNR) di Sulawesi Utara dan Newmont Nusa Tenggara (NTT) di Nusa Tenggara.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> [http://www.bps.go.id/tah\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=12&notab=1](http://www.bps.go.id/tah_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1)

Sebagai perusahaan privat yang terdaftar di bursa saham terkemuka di dunia Newmont terikat pada standar profisiensi yang tinggi serta kepemimpinan di bidang-bidang manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan bagi para karyawannya dan masyarakat sekitar. Sebagai anak perusahaan dari Newmont Mining Corporation, Newmont Nusa Tenggara (NNT) menandatangani Kontrak Karya (KK) dengan Pemerintah Indonesia, juga terikat untuk menerapkan standar profisiensi yang tinggi serta kepemimpinan di bidang-bidang manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan bagi para karyawannya dan masyarakat sekitar. Salah satu bagian dari proses penataan terhadap standard profisiensi yang tinggi adalah komitmen PT NNT untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Lebih dari 30-40 izin atau persetujuan mulai dari yang sederhana seperti izin untuk mempekerjakan seorang ekspatriat sampai ke izin untuk membuang *tailing*, telah dipenuhi.

Seperti halnya perseroan terbatas lainnya di Indonesia, PT NNT terdiri dari para pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan Direksi mengadakan pertemuan percaturwulan dalam masa satu tahun, yang diikuti dengan pertemuan dewan komisaris, sebagai tambahan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan direksi yang terdiri dari 4 orang direktur bersama-sama dengan Richard Bruce Ness, masing-masing memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Dalam masa operasional, salah satu direktur ditempatkan dilokasi pertambangan yang sekaligus menduduki posisi sebagai *general manager* dan Kepala Tehnik Tambang, dengan fungsi utama mengatur dan menetapkan keadaan yang dipertanggungjawabkan untuk semua masalah yang berhubungan dengan Kesehatan kerja, Keselamatan dan Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan

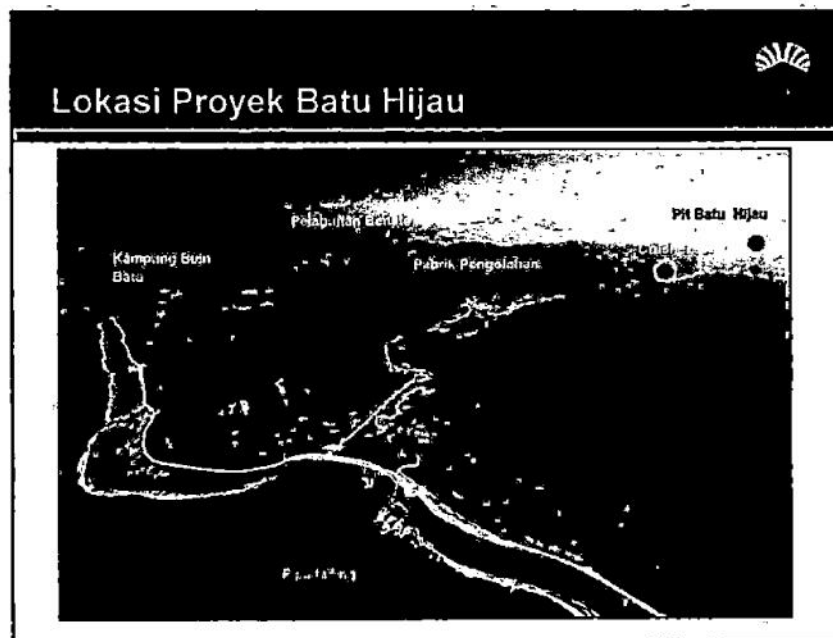


Energi No.555K/26/M.PE/1995 perihal Kesehatan, Keselamatan Tenaga Kerja, dan Lingkungan.

Visi perusahaan adalah : menjadi perusahaan tambang yang paling dihargai dan dihormati melalui pencapaian kinerja terdepan dalam industri tambang. Sedangkan misi : membangun perusahaan tambang yang berkelanjutan dan mampu memberikan laba tertinggi kepada pemegang saham dan menjadi yang terdepan di bidang keselamatan kerja, perlindungan lingkungan dan tanggungjawab sosial.

## 2. Lokasi proyek batu Hijau

Lokasi proyek batu hijau terletak di Kecamatan Jereweh yang luasnya 879,80 km<sup>2</sup>, disudut baratdaya Sumbawa dengan jarak 128 km dari Ibukota Kabupaten Sumbawa, 224 km dari Ibukota Provinsi Mataram



**Gambar 2.1. Lokasi Proyek Batu Hijau<sup>39</sup>**

<sup>39</sup> Laporan Tahunan PT. Newmont Nusa Tenggara Tahun 2011

Semua lokasi kegiatan penambangan PT.NNT terletak di Kecamatan Jereweh yang meliputi areal 880 km<sup>2</sup>, dengan demikian lokasi proyek melebihi seluruh kecamatan Jereweh yang paling dekat dengan lokasi proyek melebihi seluruh lebih sedikit dari luas kecamatan Jereweh. Desa-desa di bagian selatan Kecamatan Jereweh yang paling dekat dengan lokasi tambang lebih jarang penduduknya dan perkembangannya lebih lambat daripada desa-desa di Utara.

### **3. Gambaran Proyek Batu Hijau**

Proyek batu hijau merupakan penemuan tembaga, emas dan perak terbesar dalam sejarah Newmont sejak perusahaan ini didirikan 75 tahun yang lalu. Batu Hijau adalah ruang terbuka tambang emas dan tembaga, terletak di Pulau Sumbawa di bagian timur kepulauan Indonesia. Tambang ini terletak di daerah perbukitan enam mil pedalaman ke timur dan sembilan mil ke utara dari laut. Tambang ini beroperasi di bawah Kontrak Kerja generasi keempat dari pemerintah pusat yang dibuat pada tahun 1986. KK yang asli mencakup area seluas 1.127.134 hektar meliputi bagian-bagian dari Pulau Sumbawa dan Lombok. Bijih Besi di Batu Hijau ditemukan pada tahun 1990. Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) disetujui pada Oktober 1996 dan pembangunan dimulai pada Mei 1997. Tambang ini mulai beroperasi pada Desember 1999.

Pembangunan proyek Batu Hijau pun dimulai selama lebih kurang tiga tahun dengan menghabiskan biaya total sebesar 1,8 miliar dolar AS. Selama masa pembangunan proyek atau masa konstruksi antara tahun 1997-1999 sekitar 17.000 tenaga kerja dilibatkan. Tanggal 1 Maret 2000 PT NNT yang lebih akrab disebut

Newmont Batu Hijau memulai produksi komersial perdananya. Kerja keras sejak 1986 itu tidak sia-sia sekaligus menjanjikan masa depan bagi masyarakat di sekitar pertambangan tersebut.

Batu Hijau adalah tambang terbuka (*open pit mine*). Artinya semua mineral berharga yang mengandung tembaga, emas, dan perak ditambang dari permukaan tanah dengan menggunakan alat berat tambang. Pada saat pit digali baik batuan yang mengandung mineral maupun batuan limbah harus diambil. Untuk melakukan penambangan dalam sebuah lubang besar di tanah diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai istilah bijih dan batuan sisa. Bijih adalah batuan yang mempunyai kandungan mineral, seperti tembaga, emas, dan perak, sedangkan batuan batuan sisa adalah material yang tidak mengandung cukup mineral berharga penambangan dilakukan dengan cara mengambil batuan bijih maupu batuan sisa tambang.

Penambangan batuan baik bijih maupun bantuan sisa di Batu Hijau mencapai 600.000 ton per hari. Sedangkan total batuan yang ditambang selama masa operasi tambang diperkirakan mencapai tiga miliar ton. Belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa sesungguhnya tambang Batu Hijau lebih banyak tembaga dari pada emas dan perak. Untuk mendapatkan satu truk bijih harus ditambang tiga truk batuan. Bijih diangkut ke instalasi pengolahan mineral, sedangkan batuan sisa diangkut ke area pembuangan. Karena itu Batu Hijau merupakan cebakan tembaga porfiri dengan sedikit kandungan emas dan perak. Setiap ton bijih yang diolah menghasilkan rata-rata 4,87 kilogram tembaga, sedangkan hasil emas yang diperoleh sangat sedikit hanya 0,37 gram dari setiap

ton bijih yang diolah. Perbandingannya, apabila bijih yang diproses setara dengan 100 kilogram padi, katakanlah mewakili 100 kilogram bijih, maka tembaga yang dihasilkan hanya 0,5 kilogram, sementara emas hanya 0,037 gram atau kurang dari bobot satu butir padi.<sup>40</sup>

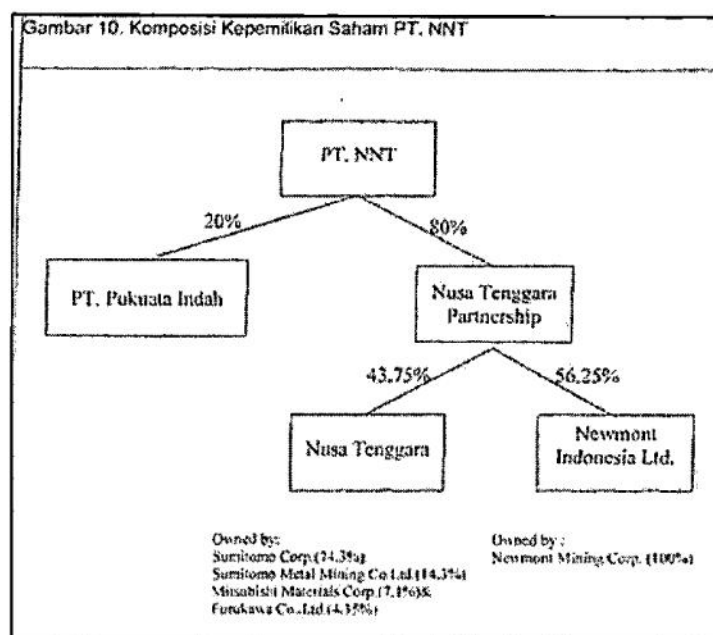
Saat ini wilayah proyek pertambangan mencapai 87.540 hektar. Pada bulan Desember 2006 diperkirakan ada 888.685 juta ton bijih. Pada waktu itu total cadangan yang diperkirakan adalah:

- Tembaga = 8.927 Mlbs (juta pon)
- Emas = 9.542 Kozs (Kilo ons)
- Perak = 30.173 Kozs (Kilo ons)
- Tingkat pertambangan per tanggal itu adalah 712.000 tonne (784.000 ton) per hari, dengan tingkat per tahunnya 250 juta tonne (286 juta ton).
- Kompleks pertambangannya memiliki pembangkit listrik terpadu yang mampu menghasilkan 157,9 megawatt dari pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 112-megawatt dan pembangkit listrik tenaga diesel berkapasitas 45,9-megawatt.
- Ada juga fasilitas pelabuhan dengan banyak dermaga yang mampu menangani hingga 800.000 ton konsentrat per tahun.
- Limbah dari operasi tambang ini dibuang menggunakan sistem Penempatan Buangan Laut. Limbah ini dibuang ke laut pada kedalaman 125 meter dari permukaan di mana nantinya limbah ini akan

<sup>40</sup> Eddy Karna Singel, *Batu Hitam Dulu, Kini dan Esok*, PT Neumont Nusa Tenggara, Sumbawa

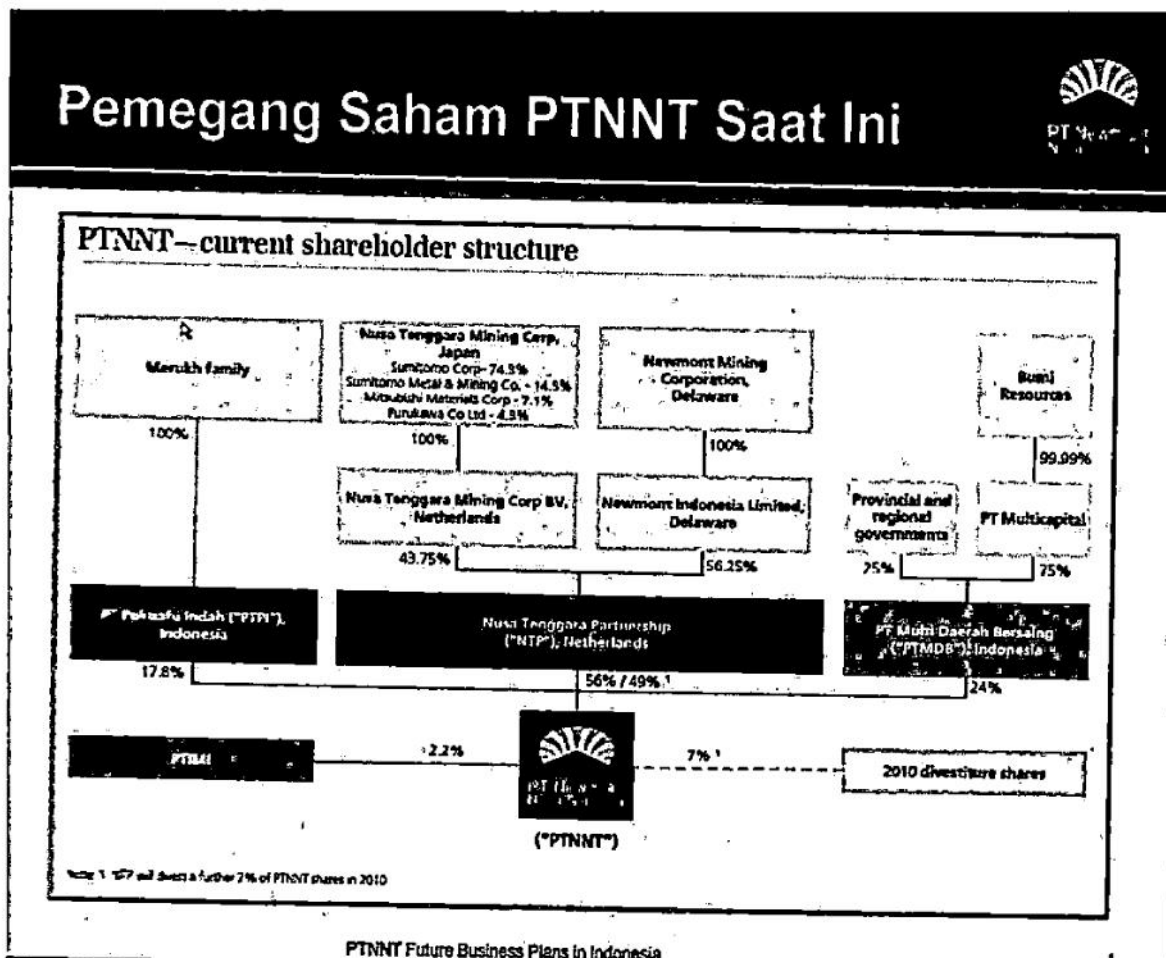
Pemerintah Indonesia mengeluarkan izin penambangan setelah perusahaan berbadan hukum Indonesia dengan nama PT. Newmont Nusa Tenggara selanjutnya disingkat PT.NNT. Komposisi pemegang saham PT.NNT dimiliki oleh 80% Newmont Nusa Tenggara Partnership (terdiri dari Newmont Gold Company USA 45%, Sumitomo Corporation Japan 35%), dan 20% PT. Pukuafu Indah Indonesia. (lihat gambar)

Gambar 2.2. Komposisi Kepemilikan Saham PT.NNT Tahun 2000



Sumber: PT.NNT

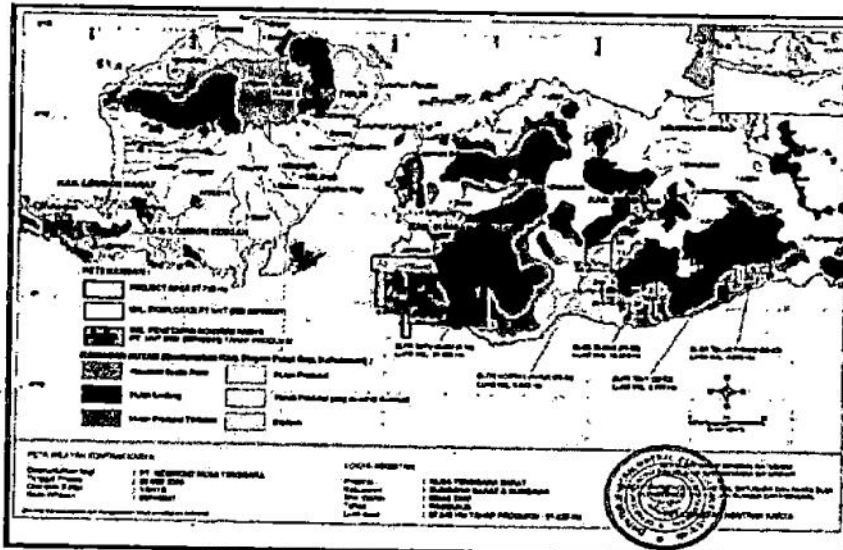
Dalam perkembangannya komposisi saham mengalami perubahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.2. Komposisi Pemegang Saham Tahun 2010

Pemegang kepentingan dalam proyek Batu Hijau ini adalah Pemerintah RI dari pusat sampai daerah provinsi dan Kabupaten penghasil (sumbawa), masyarakat disekitar lokasi proyek, kontraktor, para supplier, para investor, para kreditor, partners/pemegang saham serta perusahaan pengoperasi pertambangan. PT.NNT menandatangani kontrak karya generasi keempat dengan pemerintah Indonesia pada bulan Desember 1986 dan telah berjalan selama 26 tahun. Kontrak karya tersebut mencakup areal seluas 116 900 hektar di Pulau Sumbawa.

## Kontrak Karya PTNNT



Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara beserta prospeknya seluas +/- 87.540 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No : 313.k/30/DJB/2009 tanggal 18 Juni 2009.

Gambar 2.3. Kontrak Karya PT.NNT<sup>41</sup>

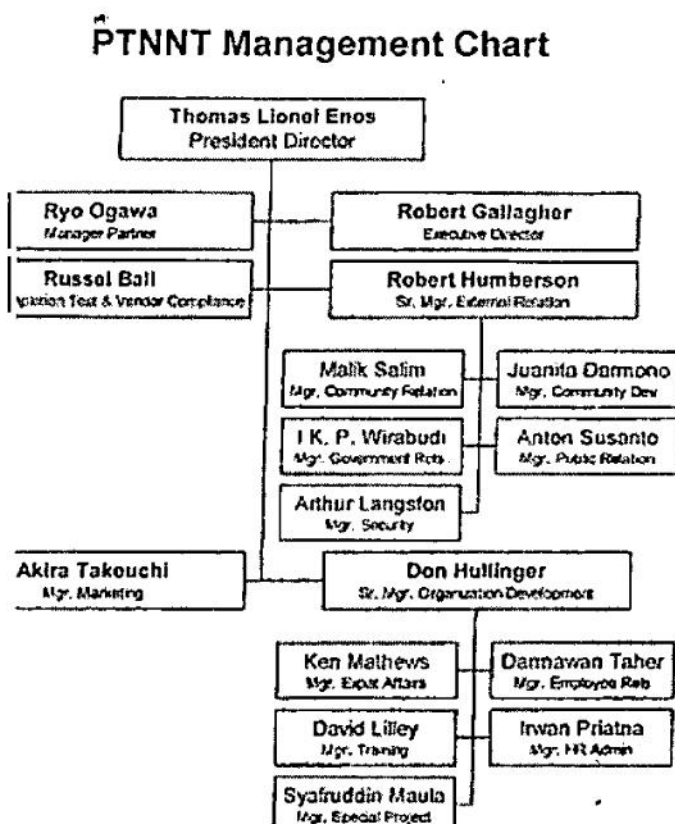
Kegiatan eksplorasi dimulai tahun 1986, tubuh cebakan batu hijau ditemukan bulan Mei 1990, studi kelayakan disetujui bulan Mei 1997, studi AMDAL disetujui bulan Oktober 1996, izin konstruksi disetujui bulan Mei 1997 dimulai 1998 dan rampung pada 1999. Proyek batu hijau merupakan proyek pertambangan yang berkapasitas awal operasi (*start-up*) terbesar di dunia. Total biaya konstruksi adalah kurang lebih US\$ 1,9 milyar, merupakan pinjaman yang diperoleh dari mitra usaha. Sisa dana sebesar 1 milyar, merupakan pinjaman yang diperoleh dari beberapa lembaga kredit ekspor dan bank-bank komersil.

Sejak tahun 1995, kegiatan perencanaan, perekayasaan, dan konstruksi penting telah dilakukan di lokasi Batu Hijau. Kegiatan tersebut segera

<sup>41</sup> Laporan Tahunan PT. Newmont Nusa Tenggara Tahun 2011

berlanjut hingga triwulan keempat 1999, saat diselesaikannya kegiatan pembangunan proyek diperkirakan sekitar 14.000 orang telah dipekerjakan selama masa puncak kegiatan konstruksi berlangsung.

#### 4. Struktur organisasi PT.NNT



Gambar 2.4. Struktur Organisasi PT.NNT

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT. Newmont Nusa Tenggara dapat dilihat pada (Lampiran 1 hlm 91-95)

Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan lingkungan dalam perkembangannya PT.NNT mendirikan struktur organisasi Newmont Watch. Organisasi ini telah memulai kerja tahun 1999 yang bekerja sama dengan PT Newmont Nusa Tenggara di Lingkungan Tabang, Sumbawa. Aktivitas difokuskan pada pembinaan masyarakat lokal melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan



penyadaran akan nilai-nilai budaya (kearifan) lokal. Tujuan untuk meminilisir potensi konflik sosial antar penduduk setempat dengan para pendatang di wilayah tambang.

Newmont Watch terdaftar secara resmi sebagai suatu badan hukum yang bersifat nirlaba. Dewan anggota, yang merupakan perwakilan dari beberapa LSM terkait, adalah hirarki tertinggi dalam struktur organisasi Newmont Watch. Anggota dewan dapat tetap aktif dalam LSM yang bersangkutan, namun dalam kapasitas sebagai bagian dari Dewan Anggota, mereka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Newmont Watch dan tidak mewakili kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Dewan Anggota dapat berdomisili di mana saja, namun seluruh anggota melakukan pertemuan setiap enam bulan sekali.

Komite staf ahli dibentuk untuk membantu para pelaksana dalam berbagai persoalan teknis. Komite ini beranggotakan tenaga ahli dari berbagai latar belakang keahlian yang telah terbukti kemampuan serta pengalamannya, seperti ahli lingkungan, kimia, biologi, perpajakan, geologi, pertambangan, pemerintahan, hukum, ketenagakerjaan, sosiologi, anthropologi dan lain sebagainya. Beberapa orang anggota komite adalah pegawai PT. Newmont Nusa Tenggara dan pemerintah, namun integritas dan komitmen mereka terhadap misi Newmont Watch dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi utama dari komite ini adalah memberikan konsultasi teknis, metodologi dan peraturan terkait demi validitas serta keakuratan hasil penelitian dan investigasi.

Secara operasional Newmont Watch dilaksanakan oleh Executive Director, Managing Director, Secretary General, Finance Manager, Campaign Outreach & Information Manager, Research Manager, Investigation Manager, Advocacy &

Litigation Manager, Office Manager dan para karyawan paruh waktu serta sukarelawan.

- Executive Director: Bambang Hoesni MA, bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan dan pengembangan program, serta perluasan jaringan kerja dan dukungan organisasi nasional dan internasional. Mewakli Newmont Watch untuk menyampaikan perspektif organisasi dalam pertemuan, presentasi dan negosiasi dengan pihak lain.
- Managing Director: Ir. HM Devar Yani, bertanggung jawab terhadap management program, organisasi, logistik, sumber daya manusia dan pengembangannya, serta bertugas sebagai fund-raiser.
- General Secretary: Drs. Malik Kurniawan, bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan sekretarial, berkoordinasi dengan direktur dan mewakili direktur jika diperlukan.
- Finance Manager: Sri R. Jatmiko SE, bertanggung jawab terhadap seluruh masalah keuangan dan pembukuan.
- Campaign Outreach & Information Manager: Dra. Bella Francisca, bertanggung jawab menyediakan dukungan strategis dan input untuk kegiatan publikasi, konsultasi dan negosiasi. Menyiapkan rencana desain komunikasi/publikasi dan media yang digunakan, serta mengimplementasikan sistem informasi manajemen. Menangani dokumen-dokumen penelitian yang menyangkut peraturan pemerintah dan berbagai isu pertambangan serta

- Research Manager: Ir. Gusti Hardiansyah MSc, bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan berkoordinasi dengan komite staf ahli serta Investigation Manager guna memastikan akurasi dan fokus dari penelitian yang dilakukan serta sumber-sumber informasi Newmont Watch. Research Manager juga bertugas untuk memonitor kebijakan dan praktek PT. Newmont Nusa Tenggara serta lembaga pemerintah terkait, serta menyiapkan laporan dan makalah.
- Investigation Manager: Anwar Arifin SH, bertanggung jawab untuk melakukan investigasi terhadap setiap pengaduan dan informasi menyangkut penyimpangan dari PT. Newmont Nusa Tenggara sebelum memberikan rekomendasi kepada Advocacy & Litigation Manager untuk melakukan tindakan hukum. Investigation Manager harus berkoordinasi dengan komite staff ahli dan Research Manager dalam melaksanakan investigasi dan harus membuat laporan dan makalah.
- Advocacy and Litigation Manager: Prahara Yudha SH, bertugas untuk mewakili Newmont Watch dan kliennya dalam setiap tindakan hukum. Membantu anggota, mitra kerja dan klien Newmont Watch dalam konsultasi dan negosiasi. Melakukan koordinasi dengan para direktur dan Investigation Manager dalam melakukan tindakan hukum.
- Office Manager: Drs. Eka Putra MBA, bertanggung jawab terhadap operasional rutin kantor dan staff. Mengkoordinir tugas dan distribusi lanangan para staff paruh waktu dan sukarelawan. Menerima pengaduan awal

Watch adalah wacana yang berasal dari inisiatif masyarakat lokal dan lahir sebagai suatu wahana atas dukungan berbagai lembaga Hak Asasi Manusia (HAM), pemantau korupsi, lingkungan, keadilan sosial, masyarakat adat dan ketenagakerjaan di Indonesia. Organisasi ini menyuarakan perlunya respon masyarakat yang terkoordinir terhadap ancaman dampak lingkungan dan sosial serta kepentingan umum lainnya yang disebabkan oleh kebijakan maupun praktek dari PT. Newmont Nusa Tenggara.

Newmont Watch merupakan jawaban atas lemahnya upaya untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat lokal dalam kontrak karya eksploitasi sumber daya alam lokal. Dengan dukungan beragam organisasi nasional dan internasional, Newmont Watch melakukan pengawasan, kajian, pemberdayaan publik dan tindakan hukum yang diperlukan untuk meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara maupun penentu kebijakan publik terkait. Sebagai organisasi nirlaba dan independen, Newmont Watch - yang anggotanya terdiri dari berbagai tenaga ahli, pemuka masyarakat dan para aktifis - steril dari berbagai kepentingan politik maupun kepentingan lainnya yang bersifat partisan.

## **5. Dampak Lingkungan Pengelolaan PT. NNT**

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.

Dewasa ini masyarakat tidak hanya sekedar memperhatikan suatu perusahaan hanya dari produk yang dihasilkan, apakah bisa memenuhi kebutuhan mereka secara lebih

efisien dibandingkan produk lain, tapi juga dengan kritis melihat keberadaan perusahaan apakah perusahaan tersebut menjadi bencana di tengah masyarakat untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Masyarakat juga kritis dan selektif melihat apakah suatu perusahaan melakukan hal-hal tidak terpuji seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, manipulasi pajak, dan penindasan terhadap hak-hak buruh. Banyak konflik yang bermunculan diakibatkan dampak negatif keberadaan industri di Indonesia yang tidak berkesudahan seperti antara masyarakat Sumbawa Barat dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan Pemerintah. Tekanan yang kuat dari masyarakat mengharuskan perusahaan menata kembali konsep bisnis mereka tidak sekedar berorientasi profit saja tetapi juga harus memiliki tanggung jawab sosial atau lebih sering dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Perusahaan tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan semata melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial dan aspek lingkungan.

Perusahaan yang bergerak di sektor tambang dan mineral tak lepas dari sorotan terkait dampak lingkungan yang dihasilkan. Maka itu tak heran jika kritikan mengalir ke berbagai perusahaan tambang, tak terkecuali PT Newmont. Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ali Husein AL Khairy<sup>42</sup>, menyebut PT.NNT telah menguasai sekitar 8000 hektar lahan di NTB. Sebagian besar lahan itu, menurut Ali, merupakan ruang hidup bagi warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dengan dikuasainya lahan itu, akses warga menuju hutan terhambat. Padahal, hutan salah satu sumber penghidupan bagi warga, karena terdapat hasil hutan yang biasa diambil warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya madu, rotan dan lainnya. Menurut Ali Hal tersebut sudah berkurang dan di beberapa tempat tertutup. Mengingat terdapat kerusakan lingkungan, Ali menjelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, PT.NNT berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Yaitu dengan rehabilitasi dan

<sup>42</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd4c73589d02/perusahaan-tambang-jangan-abai-kan->

konservasi. Sayangnya, uang yang seharusnya digunakan untuk pemeliharaan lingkungan itu malah dipakai PT.NNT untuk melakukan manajemen konflik di tengah masyarakat. Akibatnya, program konservasi dan rehabilitasi lingkungan tidak berjalan maksimal. Oleh karenanya, Ali berpendapat bahwa perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sistem tambang terbuka yang dilakukan PT.NNT berpotensi semakin berdampak besar. Karena mekanisme pemulihan lingkungan tidak bersandar pada audit lingkungan terhadap daya tampung dan dukungannya. Kondisi itu, menurut Ali, akan semakin meluas karena terdapat forum yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah (Pemda) dan PT.NNT. Forum bernama komisi kerja eksplorasi (KKE) itu, menurut Ali, akan membahas masalah eksplorasi yang dilakukan PT.NNT. Ali melihat KKE sebagai kepanjangan tangan dari PT.NNT untuk memperluas lahan tambangnya di KSB. Sehingga ada legitimasi bagi PT.NNT dalam melakukan perluasan tambang. Forum tersebut menurut Ali dibiayai oleh PT.NNT, sehingga dia menduga terdapat proses gratifikasi di sana. Selain itu, Ali mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya mampu menghitung berapa sumber daya alam (SDA) yang sudah dikeruk PT.NNT. Jika pemerintah mampu menjawab persoalan itu maka terdapat potensi saham yang dapat dimiliki oleh pemerintah dari PT.NNT. Yaitu dengan mengkonversi nilai SDA yang sudah dikeruk menjadi saham pemerintah di PT.NNT.

Sorotan lain datang dari Lembaga Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang diwakili oleh Riza Adha Damanik<sup>43</sup>, yang menyatakan bahwa Metode pertambangan NNT ini sudah selangkahnya perlu diawasi secara intensif. PT.NNT menggunakan metode pertambangan open pit (tambang terbuka) dan membuang limbah sisa olahan dengan menggunakan sistem submarine tailing disposal (STD). Berarti, sedikitnya 110 ribu ton tailing telah dibuang ke laut setiap hari oleh perusahaan tersebut. Riza menambahkan bahwa bukan itu saja, beberapa sentra pemukiman seperti di Desa Tongo

<sup>43</sup><http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/1947274-dosa-nt-newmont-pusa-tenggara/>

Sejorong di lingkaran tambang sekarang sudah tidak dapat menjalankan kegiatan pertanian secara normal, karena praktek pertambangan yang boros air telah berakibat timbulnya kekeringan lingkungan sekitar. Para nelayan di pesisir pantai Sumbawa Barat seperti Pantai Benete, Labu Lalar, dan Poto Tano, sekarang tidak lagi dapat memperoleh ikan dari perairan mereka. Akibat tercemar tailing, para nelayan di Kabupaten Lombok Timur yang menggantungkan penghidupannya terhadap potensi perikanan selat alas, telah kehilangan sejumlah besar hasil tangkapan ikan.

Tekanan eksternal mengakibatkan peringkat PROPER lingkungan PT NNT turun dari hijau menjadi biru pada 2004 pada saat audit lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Biru adalah peringkat ketiga dari lima warna kategori dan menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan tambang mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada 2003, PT Newmont termasuk perusahaan yang memperoleh peringkat tertinggi dari 85 perusahaan yang ikut serta. Penilaian meliputi 51 kriteria seperti pengendalian limbah cair, polusi udara dan limbah berbahaya; penerapan analisis dampak lingkungan; pengelolaan sumber daya dan lingkungan; dan pengembangan masyarakat. Penilaian ini diikuti dengan kunjungan lapangan untuk verifikasi serta wawancara dengan karyawan dan anggota masyarakat. Faktor eksternal yang mengakibatkan turunnya nilai tersebut adalah tuntutan oleh beberapa nelayan setempat bahwa kegiatan tambang telah mengurangi hasil tangkapan mereka. Untuk mengatasi tuduhan ini dan memperbaiki kesalahan persepsi, PT Newmont telah menyusun suatu sasaran untuk melibatkan diri lebih banyak dalam pengembangan desa nelayan setempat dan melakukan survei perikanan pada 2005. Kegiatan pertambangan memiliki daya rusak bagi lingkungan. Lingkungan yang rusak itu sulit dipulihkan. Daya rusak ini berkontribusi terhadap pemiskinan di sekitar

kawasan pertambangan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, potensi terjadinya kerusakan ekosistem menjadi semakin besar dan semakin sulit dipulihkan. Seluruh tahap pengembangan tambang mineral memiliki dampak merusak lingkungan hidup dan ekosistem alami tempatnya beroperasi. Di wilayah operasi di mana masyarakat setempat hidup dan penghidupannya bergantung sebagian dan atau sepenuhnya kepada tanah dan kekayaan alam, seluruh mata rantai operasi tambang mineral memiliki dampak terhadap penurunan mutu dan pelenyapan kehidupan masyarakat. Seluruh aspek penghidupan masyarakat terkena dampak dari seluruh mata rantai operasi tambang. Proses pemiskinan terjadi bahkan sejak awal pertambangan masuk. Hak penguasaan dan kelola rakyat atas tanah diingkari, sehingga perijinan pertambangan dikeluarkan secara sepihak tanpa persetujuan rakyat yang menguasai dan mengelola tanah. Jika perusahaan tambang beroperasi, rakyat tak punya pilihan. Mereka menerima ganti rugi tanah yang ditetapkan secara sepihak atau digusur karena menolak ganti rugi. Akibatnya konflik tanah antara pertambangan dan masyarakat di awal operasi terjadi di hampir semua lokasi pertambangan.

Di hadapan pertambangan, penduduk lokal seolah tak punya hak untuk menolak pertambangan yang akan beroperasi di wilayah kelola mereka. Apalagi memilih model ekonomi yang berkelanjutan, seperti pertanian, kehutanan, pariwisata atau perikanan. Padahal saat tambang beroperasi, pemiskinan terus berlangsung sejalan dengan menurunnya kualitas pelayanan alam dan produktivitas rakyat, khususnya terkait dengan sumberdaya tanah dan air. Untuk mendapatkan 1 gram emas di tambang PT Newmont dihasilkan 2480 gram limbah. Selain itu, pertambangan juga dikenal rakus air. Air menjadi bahan baku kedua setelah batuan



dan tanah galian. Di pertambangan Barisan Tropical Mining, Sumatera Selatan, misalnya, dibutuhkan setidaknya 104 liter air untuk mendapatkan 1 gr emas. Krisis air merupakan masalah yang selalu dijumpai di lokasi pertambangan. Kuantitas dan kualitas air menurun, selain karena air disedot untuk kebutuhan pertambangan, juga karena pertambangan itu sendiri juga merusak sistem hidrologi tanah dan mencemari lingkungan perairan, baik karena rembesan air asam tambang, rembesan logam berat, maupun buangan lumpur tailing.

Limbah pertambangan dibuang ke lingkungan sekitar, yaitu ke lokasi-lokasi produktif tempat mata pencaharian penduduk: sungai, hutan, rawa, sumber-sumber air, lahan pertanian, dan laut. Itulah mengapa sektor pertambangan mematikan sektor lain yang berkelanjutan, seperti kebun, lahan pertanian, rumah dan pekarangan, hutan adat, tambang rakyat, wilayah peternakan, penggembalaan dan perikanan. Sebagaimana dicatat JATAM, pada tahun 2004 Newmont membuang sekitar 5,8 juta ton tailing ke Teluk Buyat dan 310 juta ton tailing ke Teluk Senunu, Sumbawa. PT Newmont membuat sedikitnya 5 milyar ton limbah ke sungai, danau, dan hutan-hutan hingga laut. Barisan Tropical Mining (*Laverton Gold*) membuang 2,5 ton tailing ke lingkungan dan mencemari sungai.

Menanggapi permasalahan tersebut, *Manager Enviromental Affairs* PT Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) menyatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan mulai dari pengerukan bahan baku tambang sampai proses pengolahan diupayakan semaksimal mungkin aman bagi lingkungan. Serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada terkait lingkungan. Program lingkungan yang menjadi unggulan perusahaan yang berlokasi di Batu Hijau, kabupaten Sumbawa Barat (KSB), provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu adalah reklamasi. Yaitu proses pemulihan lingkungan pada lahan yang digunakan untuk eksploitasi

tambang. Karena proses produksi yang dilakukan PT NNT menimbulkan jejak yang cenderung merusak lingkungan. Misalnya salah satu titik tambang utama yang dikeruk PT NNT di Batu Hijau. Lokasi itu sebelumnya adalah bukit yang tingginya mencapai 600 meter. Setelah digarap, bukit itu hilang dan berubah menjadi sumur berdiameter dua kilometer dengan kedalaman 200 meter. Untuk mengembalikan lahan itu agar aman bagi lingkungan maka diperlukan reklamasi. Untuk menimbun lahan bekas proses produksi tersebut digunakan tanah dan batuan yang berasal dari sisa pengerukan tambang. Sebelumnya, tanah subur yang berasal dari lahan yang akan dijadikan lahan tambang, diselamatkan, sehingga pada saat reklamasi dapat digunakan untuk penimbunan.

Lapisan tanah timbunan *sub soil*, memiliki ketebalan 2,2 meter, sedangkan lapisan terluar (*top soil*) setebal 1,5 meter. Untuk menjaga kestabilan, tanah yang ditimbun berbentuk lereng itu dipadatkan dengan menggunakan *buldozer*. Hal tersebut ditujukan agar lahan yang direklamasi tidak mudah tergerus air hujan. Kemudian, tanah diperkuat dengan menanam rumput-rumputan dan kacang-kacangan. Penanaman itu dilakukan dengan proses *liquid* atau bibit cair yang disemprot ke permukaan lahan. Setelah melewati tiga bulan, tanaman itu tumbuh dan lahan tersebut sudah siap ditanami pohon. Berbagai jenis pohon yang ditanam itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi, bahkan ada pula pohon yang tergolong langka. Misalnya pohon gaharu, rotan, majaq dan lainnya. Reklamasi yang sudah dilakukan PT. NNT hampir 700 hektar. Satu hektar lahan membutuhkan lebih dari seribu bibit tanaman. Untuk memenuhi kebutuhan itu, selain melakukan penanaman dengan benih dan bibit, PT.NNT membangun kebun pangkas. Metode itu, termasuk yang terbaik dari serangkaian uji coba yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2011 luas lahan yang direklamasi 22,9 hektar dengan biaya AS\$ 3,5 juta

Komitmen menjaga lingkungan, PT NNT menyimpan dana khusus untuk proyek reklamasi. Dana tersebut sebagai salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk menjaga agar perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan tidak kabur sebelum melakukan reklamasi dan memenuhi aturan hukum lainnya. Besaran dana yang disimpan itu, sesuai dengan rencana reklamasi yang akan dilakukan oleh PT NNT. Setelah reklamasi selesai, aparat berwenang melakukan tinjauan langsung ke lokasi. Setelah itu aparat berwenang melakukan pengkajian apakah reklamasi itu sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Jika mendapat lampu hijau maka dana itu dapat dikembalikan ke PT NNT. Selain permasalahan dampak lingkungan dengan kewajiban PT. NNT untuk melakukan reklamasi, PT. NNT juga mempunyai kewajiban untuk melakukan community development (comdev) terhadap masyarakat di sekitar tambang selain pembayaran pajak dan royalti kepada pemerintah yang akan dibahas lebih lanjut pada bab III